

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Acuan Penelitian**

###### **1. Ndaruningpuri Wulandari (2006)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan jumlah sampel 91 perusahaan publik. Alat uji yang digunakan adalah menggunakan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Indikator mekanisme *corporate governance* penelitian ini ada dua, pertama indikator mekanisme *corporate governance* internal yang diproksikan dengan jumlah dewan direktur, proporsi komisaris independen, dan debt to equity. Kedua, ukuran mekanisme *corporate governance* eksternal yang diproksikan dengan institutional ownership. Ukuran kinerja perusahaan penelitian ini diproksikan dengan tobin's Q. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Dari pengujian analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa pada indikator mekanisme *corporate governance* internal, hanya debt to equity yang signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pada indikator mekanisme *corporate governance* eksternal *institutional ownership* tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode *purposive sampling*, menggunakan data sekunder, dan juga variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian terdahulu adalah variabel dependen, sampel, dan tahun penelitian. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel dependen Tobin's Q, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel dependen ROA, ROE, dan Tobin's Q dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Sampel dan tahun penelitian terdahulu adalah menggunakan perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada periode 2000-2002, sedangkan sampel dan tahun penelitian saat ini adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014.

## **2. Dian Prasinta (2012)**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, statistik deskriptif, uji statistik inferensial, dan juga koefisien determinasi. Penerapan *good*

*corporate governance* diukur dengan skor CGPI. Kinerja keuangan diukur dengan *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *Tobin's Q*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on assets*, namun terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on equity*, dan tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *Tobin's Q*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional, namun pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *good corporate governance* masih kurang.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder, menggunakan metode purposive sampling, dan menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sampel dan tahun penelitian. Sampel dan tahun penelitian terdahulu adalah menggunakan perusahaan yang ikut serta dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* dan terdaftar di BEI periode 2006-2010, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

### **3. Dominikus Octavianto Kresno Widagdo dan Anis Chariri (2014)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *non financial* yang terdaftar di BEI tahun 2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni metode penentuan sampel dari

populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi linear. Penelitian ini diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode purposive sampling, menggunakan variabel dependen kinerja perusahaan, dan juga menggunakan data sekunder. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel dependen, sampel dan tahun penelitian. Variabel dependen penelitian terdahulu hanya menggunakan EPS dalam mengukur kinerja perusahaan, sedangkan variabel dependen penelitian saat ini menggunakan ROA, ROE, dan Tobin's Q dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Sampel dan tahun penelitian terdahulu adalah menggunakan sampel perusahaan *non financial* yang terdaftar di BEI periode 2012, sedangkan penelitian saat ini adalah menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Agency

Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari agency theory. *Agency theory* mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda (Sulistyanto dan Prapti, 2003) . Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Sistem corporate governance terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders yang lain ; dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal (Husnan, 2001).

Jehsen dan Meckling (1976), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana /kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

### **2.2.2. Corporate Governance**

Committee (1992) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan atau mengawasi perusahaan. Pandangan Rountable (1997) , *corporate governance* yang baik merupakan suatu ukuran yang memenuhi semua proporsi, dan dipengaruhi oleh hubungan antara para partisipan dalam sistem *governance*. Beberapa prinsip dalam *corporate governance*, antara lain diungkapkan oleh Rountable (1997) dan Alijoyo (2003) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam suatu negara untuk mengevaluasi dan meningkatkan hukum, institusi dan kerangka peraturan untuk *corporate governance*, dan untuk memberikan arahan dan saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses pengembangan *corporate governance* yang baik. Prinsip tersebut juga

diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* (Rountable, 1997).

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut : (Solihin, 2009)

1) Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

#### 4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### **2.2.3. Komposisi Dewan Komisaris**

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance*, 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Pengukuran komposisi dewan komisaris yaitu persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel.



#### 2.2.4. Ukuran Dewan Komisaris

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993) .

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993) . Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998).

Pengukuran ukuran dewan komisaris yaitu jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel.

### **2.2.5. Komite Audit**

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 , komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 , keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Davidson III dkk. (2004) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Pengukuran komite audit adalah proporsi jumlah anggota independen dengan jumlah keseluruhan anggota komite audit.

#### **2.2.6. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, yaitu direktur memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan akan berada pada titik optimal. Ini terjadi karena direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung (Jehsen dan Meckling, 1976). Sehingga kemungkinan munculnya *agency problem* akan semakin tipis jika dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Jika direktur perusahaan juga berlaku sebagai pemilik perusahaan, maka terjadilah kesamaan tujuan antara principal dengan agent, yang berpengaruh pula pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan dibandingkan jumlah keseluruhan saham perusahaan.

### 2.2.7. Kepemilikan Institusional

Husnan (2001), menegaskan bahwa ada dua jenis *ownership* dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen (Goldberg dan Idson, 1995 dalam Suad Husnan, 2001). Jenis kepemilikan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling* dan *minority shareholders* (Asian Development Bank, 2000 dikutip dalam Suad Husnan, 2001). *Controlling shareholders* dapat bertindak sama dengan kepentingan pemegang saham atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, disamping itu juga mempunyai informasi yang lebih lengkap daripada *minority shareholders*, dan hal ini akan mempengaruhi perilaku perusahaan (Rountable, 1997).

Karakteristik kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada institusi banyak dijumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Suad Husnan, 2001 dan Gunarsih, 2003). Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik. Pada umumnya PT ini merupakan bentuk kepemilikan pendiri perusahaan atau keluarga pendiri perusahaan. Kelemahan menurut Shleifer dan Vishny (1997) adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan

kepentingan mereka sendiri yang mungkin sekali bertentangan dengan pemilik lainnya.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

#### **2.2.8. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). Suatu ukuran perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya kinerja dari perusahaan tersebut. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas labanya. Perusahaan besar juga dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil (Sri dkk., 2007).

Ukuran perusahaan diukur dari jumlah total asset perusahaan sampel.

#### **2.2.9. Kinerja Perusahaan**

Zarkasyi (2008), menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu ROA, ROE, dan Tobin's Q. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan, untuk

mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. *Return On Equity* merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba (Brigham dan Houston, 2006). Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Lalu *Tobin's Q* merupakan perbandingan antara nilai pasar perusahaan dengan nilai buku total aktiva (Darmawati, 2005). Rumus dari ketiga indikator tersebut adalah :

1. ROA, rumusnya :

$$ROA = \frac{Laba\ bersih}{Total\ asset}$$

2. ROE, rumusnya :

$$ROE = \frac{Laba\ bersih}{Ekuitas}$$

3. Tobin's Q, rumusnya :

$$Tobin's\ Q = \frac{Market\ Value\ of\ Equity + Liabilities}{Total\ asset}$$

#### **2.2.10. Hubungan Antara Komposisi Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan**

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001) . Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Jumlah dewan komisaris independen yang disarankan adalah 20% dari jumlah total dewan komisaris yang berasal dari luar pemilik atau kalangan profesional. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tugas dewan komisaris adalah : (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberi nasehat kepada direksi (Darsono, 2003).

*Agency theory* menyatakan bahwa dewan direksi yang berasal dari luar berada di posisi yang lebih baik melakukan kontrol atas kepentingan manajerial (Dalton dan Kesner, 1987 ; Fama, 1980). Beberapa penelitian terdahulu antara lain Charlie dkk. (2000), Yermack (1996), dan Beiner dkk. (2003) menemukan hubungan negatif antara proporsi dewan komisaris yang independen dan kinerja. Sedangkan Bhagat dan Black (1998) dalam Beiner dkk. (2003) melaporkan hubungan negatif yang sama, tetapi mereka menunjukkan bahwa hal itu untuk beragam pengukuran kinerja lebih dari satu periode tahun.

H1 : Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.2.11. Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan**

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993) .

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993) .

Hasil penelitian Wulandari (2006) dalam Darwis (2009) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Darwis (2009) keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan dewan komisaris ini tidak menjalankan monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi.

H2 : Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.



### **2.2.12. Hubungan Antara Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan**

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 , komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 , keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya *moral hazard* dan menengahi *agency problem* yang muncul sehingga nantinya principal dan agent akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan (Trihartati, 2010). Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Marn dan Romuald (2012) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H3 : Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.2.13. Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Perusahaan**

Kepemilikan manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, yaitu direktur memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan akan berada pada titik optimal. Ini terjadi karena direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung (Jehsen dan Meckling, 1976). Sehingga kemungkinan munculnya *agency problem* akan semakin tipis jika dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Jika direktur perusahaan juga berlaku sebagai pemilik perusahaan, maka terjadilah kesamaan tujuan antara principal dengan agent, yang berpengaruh pula pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Hasil penelitian oleh Dominikus dan Anis (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

H4 : Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.2.14. Hubungan Antara Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Perusahaan**

Husnan (2001), menegaskan bahwa ada dua jenis *ownership* dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Karakteristik kepemilikan

perusahaan yang terkonsentrasi pada institusi banyak dijumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Suad Husnan, 2001 dan Gunarsih, 2003). Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik. Pada umumnya PT ini merupakan bentuk kepemilikan pendiri perusahaan atau keluarga pendiri perusahaan. Kelemahan menurut Shleifer dan Vishny (1997) adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang mungkin sekali bertentangan dengan pemilik lainnya. Jehsen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

Hasil penelitian Charlie Weir dkk (2000) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian oleh Gunarsih (2003) adalah kepemilikan institusi domestik mempengaruhi pengelolaan (*governance*) perusahaan dan semakin tinggi proporsi kepemilikan institusi domestik maka semakin rendah kinerja perusahaan.

H5 : Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.2.15. Hubungan antara *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating**

Suatu ukuran perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya kinerja dari perusahaan tersebut. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas labanya. Perusahaan besar juga dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil (Sri dkk., 2007). Oleh karena itu, perusahaan besar juga harus memiliki sistem *corporate governance* yang baik, guna memberikan informasi yang *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Sehingga sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana *agent* dan *principal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut (Scott, 2003).

Dalam penelitiannya Sri dkk. (2007) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H6 : Apakah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.

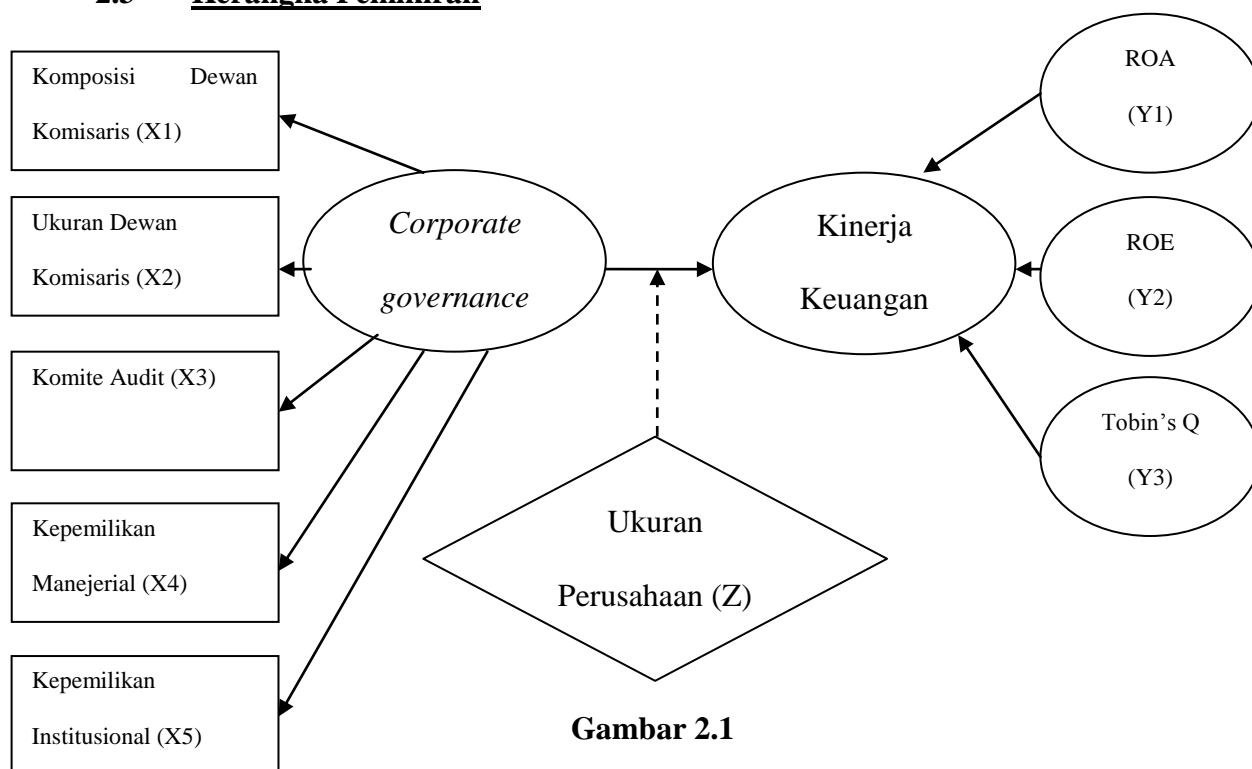
### **2.2.16. Hubungan Antara *Agency Theory* dengan Kinerja Perusahaan**

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari *agency theory*. *Agency theory* mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak

(prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda (Sulistyanto dan Prapti, 2003) . Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Sistem corporate governance terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders yang lain ; dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal (Husnan, 2001).

Jehsen dan Meckling (1976), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**

*Good Corporate Governance* dengan indikator komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat dewan komisaris. Jika komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional melakukan tugas dan tanggung jawabnya maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik, sehingga perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dengan kata lain, *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating terhadap adanya

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat mempengaruhi kinerja perusahaan dilihat dari seberapa besar jumlah total asset perusahaan, maka semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H2 : Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H3 : Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H4 : Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H5 : Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H6 : Apakah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.